



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifqi Adrian Kriswanto  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Indro Purwoko  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

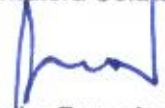
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

  
Indro Purwoko  
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Administrasi  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

  
Rifqi Adrian Kriswanto  
NIP. 19720429 199803 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA DIVISI ADMINISTRASI**  
**DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**SUMATERA SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	1. Layanan administratif dan fasilitatif perkantoran yang efektif dan efisien.	1 Layanan
2.	Meningkatnya layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan	1. Jumlah layanan program dan anggaran kanwil yang efektif dan efisien	1 Layanan
		2. Jumlah layanan manajemen kanwil yang akuntabel dan transparan	1 Layanan
3.	Meningkatnya layanan umum yang sesuai kebutuhan	1. Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	1 Layanan
4.	Terwujudnya layanan sarana internal yang tepat sasaran	1. Jumlah layanan pengadaan kendaraan bermotor dan perangkat pengolah data dan komunikasi	5 Unit
5.	Terwujudnya layanan prasarana internal yang tepat sasaran	1. Jumlah layanan prasarana internal	6 Unit
6.	Terwujudnya layanan manajemen SDM	1. Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu	157 Orang
7.	Terwujudnya layanan organisasi dan tata kelola internal	1. Jumlah layanan reformasi birokrasi di wilayah	1 Layanan
8.	Terwujudnya opini positif pada Kantor Wilayah yang disebarluaskan	1. Jumlah layanan hubungan masyarakat yang di kelola	1 Layanan
		2. Jumlah layanan keprotokoleran yang dilaksanakan dengan baik	1 Layanan
9.	Terwujudnya monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran	1. Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan kantor wilayah yang dilaporkan	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 24,831,243,000,-</b>
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 24,831,243,000,-

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

  
Indro Purwoko  
NIP. 19620202 198502 1 001

Palembang, Januari 2021  
Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Administrasi  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

  
Rifqi Adrian Kriswanto  
NIP. 19720429 199803 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA DIVISI ADMINISTRASI**  
**DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**SUMATERA SELATAN**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	82,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 24,831,243,000,-</b>
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 24,831,243,000,-

Pihak Kedua,  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Kementerian Hukum dan HAM  
 Sumatera Selatan

  
 Indro Purwoko  
 NIP. 19620202 198502 1 001

Palembang, Januari 2021  
 Pihak Pertama,  
 Kepala Divisi Administrasi  
 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
 Sumatera Selatan

  
 Rifqi Adrian Kriswanto  
 NIP. 19720429 199803 1 001



**PERJANJIAN KINRJA TAHUN 2021  
KPALA DIVISI KEIMIGRASIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERDAUS, SH., MH**  
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama**

Nama : **INDRO PURWOKO**  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 27 Januari 2021

Pihak Kedua  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan



**INDRO PURWOKO**  
NIP. 196202021985021001



Pihak Pertama  
Kepala Divisi Keimigrasian  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan



**HERDAUS, SH., MH**  
NIP. 196901111991031002





**PERJANJIAN KINRJA TAHUN 2021  
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERDAUS, SH., MH**  
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Karwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 27 Januari 2021

Pihak Pertama

Kepala Divisi Keimigrasian  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan



**HERDAUS, SH., MH**

**NIP. 196901111991031002**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN  
DENGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan, dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah	Jumlah UPT Keimigrasian yang dibina dan diawasi termasuk UKK Musi Rawas dan UKK Baturaja	2 UPT
2.		Jumlah Dokumen Fasilitatif bidang Keimigrasian	7 DOKUMEN
3.		Laporan Harian Intelijen	8 LAPORAN
4.		Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi orang asing yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	100 DOKUMEN
5.		Jumlah Laporan hasil kegiatan pengawasan sesuai ketentuan	4 LAPORAN
6.		Jumlah Laporan hasil pembinaan Keimigrasian	20 KEGIATAN
7.		Rapat TIMPORA	2 KEGIATAN

NO	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.055.354.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 1.055.354.000</b>

Pihak Kedua  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan



**INDRO PURWOKO**  
NIP. 196202021985021001



Palembang, 27 Januari 2021

Pihak Pertama  
Kepala Divisi Keimigrasian  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan



**HERDAUS, SH., MH**  
NIP. 196901111991031002





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfi Zahrin  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Indro Purwoko  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

Indro Purwoko  
NIP. 19620202 198502 1 001

Palembang, 4 Januari 2021

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

Alfi Zahrin  
NIP. 19610226 198303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
DENGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasarakatan yang produktif, mandiri dan berdaya guna	40%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	60%
		3. Persentase menurunnya residivis	1%
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	70%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	70,0

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Pengakan Hukum</b>	<b>Rp. 1.151.828.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.151.828.000,-

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

Indro Purwoko  
NIP. 19620202 198502 1 001

Palembang, 4 Januari 2021  
Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Pemasarakatan.  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

Alfi Zahrin  
NIP. 19610226 198303 1 001







**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfi Zahrin  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 4 Januari 2021

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan



---

Alfi Zahrin  
NIP. 19610226 198303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siar Hasoloan Tamba  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Indro Purwoko  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

  
Indro Purwoko  
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

  
Siar Hasoloan Tamba  
NIP. 19621221 198903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
DENGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	84%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
2.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 2.143.400.000,-</b>
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.143.400.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah 2. Jumlah Pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	26 Layanan 1 Lokus
2.	Terselenggaranya penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual 2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah 3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	100% 1 Kegiatan 2 Laporan

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 1.114.006.000,-</b>
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Rp. 1.114.006.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah Kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	77 % 79 % 76,61 % 5 % 20%

Kegiatan	Anggaran
<b>Program PembentukanRegulasi</b>	<b>Rp. 89.743.000,-</b>
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di wilayah	Rp. 89.743.000,-

<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 1.557.936.000,-</b>
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di wilayah	Rp. 1.557.936.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3.1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	23 Orang

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pembentukan Regulasi</b>	<b>Rp. 275.000.000,-</b>
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan	Rp. 275.000.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	70 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 214,073,000,-</b>
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 214,073,000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	65%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	35%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	15%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah

2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi
----	---	--	---------------

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 214,710,000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 214,710,000,-

Palembang, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

Indro Purwoko  
NIP.19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

Siar Hasoloan Tamba  
NIP. 19621221 198903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siar Hasoloan Tamba  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

Siar Hasoloan Tamba  
NIP. 19621221 198903 1 001